

## TUTURAN PEJABAT NEGARA DALAM BERITA “KORUPSI” PADA MEDIA MASSA CETAK

### *Speech State Officials in The News “Corruption” Print On Mass Media*

**Gigit Mujianto**

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: gigit\_m@yahoo.com

#### **ABSTRACT**

*Every step of the corruption problems that still need to be fixed by the state government such as the police, the Commission KPK, and the president was commenting different good conversation function, mode, type or speech strategy. It is based on the speaker's purpose in giving a speech. According to Brown and Levinson, face the speaker in speech often tend to threaten. Therefore, the speaker should keep his character, either alone or face other people's faces, in due order to avoid discrepancies in the message. Therefore, the purpose of the government in giving a speech based on two options, namely to save the state institutions and to save the good name of the passage of the law in cases of corruption simulator license.*

*Keywords: function, mode, type, strategy speech*

#### **ABSTRAK**

Setiap langkah permasalahan korupsi yang masih harus diperbaiki oleh pemerintah negara seperti polisi, KPK, dan presiden pada saat memberikan komentar yang berbeda baik fungsi pembicaraan, modus, jenis atau strategi pidato. Hal ini didasarkan pada tujuan pembicara dalam memberikan pidato. Menurut Brown dan Levinson, wajah pembicara dalam berpidato sering cenderung mengancam. Oleh karena itu, pembicara harus menjaga karakter wajahnya, baik wajah sendiri maupun wajah orang lain, dikarenakan untuk menghindari ketidaksesuaian dalam menyampaikan pesan. Oleh karena itu, tujuan dari pemerintah dalam memberikan pidato didasarkan pada dua pilihan, yaitu untuk menyelamatkan institusi negara dan untuk menyelamatkan nama baik hukum dalam kasus korupsi simulator.

Kata kunci: fungsi, modus, jenis, strategi pidato

---

#### **PENDAHULUAN**

Penelitian yang berjudul “Tuturan Pejabat Negara dalam Berita ‘Korupsi’ pada Media Masa Cetak” dilatarbelakangi oleh adanya varietas kode bahasa (*language code*) dan cara-cara berbicara yang bisa dipakai oleh anggota-anggota masyarakat dalam setiap masyarakat. Variasi ini mencakup semua varietas dialek atau style yang digunakan dalam populasi sosial tertentu, dan faktor-faktor yang mengarahkan pada seleksi dari salah satu varietas itu. Dalam hal ini setiap individu memiliki varietas kode dan style yang bisa dipilih, tetapi kecil sekali

kemungkinannya untuk bisa menghasilkan semua jenis kode dan style itu. Oleh karena itu, subkelompok masyarakat yang berbeda bisa memahami dan menggunakan sebagian dari kode-kode yang ada dalam masyarakat itu.

Sarana komunikasi yang digunakan dalam setiap masyarakat mencakup bahasa yang berbeda, dialek regional dan dialek sosial yang berbeda dari satu bahasa atau lebih, register yang berbeda (yang pada umumnya bervariasi berdasarkan dimensi formal-informal yang menjembatani perbedaan dialek), dan berbagai saluran komunikasi yang berbeda (misalnya, lisan, tulisan, isyarat).

Hakikat dan kadar keberagaman itu berkaitan dengan organisasi sosial kelompok, yang cenderung mencakup perbedaan dalam usia, jenis kelamin, dan status sosial, maupun perbedaan dalam hubungan antar-penutur, tujuan interaksi, dan setting tempat komunikasi itu terjadi. Repertoar komunikatif itu bisa juga mencakup kode-kode pekerjaan yang berbeda, bahasa keagamaan, macam-macam kode rahasia, bahasa tiruan, bahasa siulan maupun tambur, dan berbagai varietas yang digunakan untuk berbicara kepada orang asing, anak-anak muda, dan binatang piaraan.

Pengidentifikasian varietas yang terjadi dalam masyarakat menghendaki pengkajian dan deskripsi perbedaan aktual dalam pengucapan, tata bahasa, leksikon, style berbicara, dan perilaku komunikasi lain yang bisa berbeda dalam menyampaikan makna sosial. Selain itu, repertoar komunikasi suatu kelompok mencakup juga varietas strategi-strategi verbal. Strategi-strategi verbal inilah yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan, memelihara, atau mengolah hubungan peran. Pilihan penutur terhadap strategi-strategi verbal membe-rikan hubungan dinamis antara kode bahasa, tujuan penutur, dan struktur partisipasi dalam situasi-situasi spesifik (Ibrahim, 1994: 73-75).

Faktor-faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pilihan bahasa yang dilakukan oleh anggota suatu komunitas. Dapat dipahami dari partisipan, situasi, isi wacana, dan fungsi interaksi dimung-kinkan terjadinya proses komunikasi dengan pilihan bahasa dan cara-cara berbicara yang tidak sama. Suatu komunikasi yang memiliki karak-teristik dengan partisipan, situasi, isi wacana, dan fungsi interaksi tertentu akan menciptakan suatu komunikasi dengan pilihan bahasa tertentu. Ini sesuai dengan rumusan Ervin-Tripp (dalam Santoso, 1996: 3) bahwa seorang pembicara dalam banyak masyarakat tutur (*speech community*) yang masuk ke dalam situasi sosial yang berbeda yang secara formal memiliki repertoar alternatif

ujaran akan beradaptasi sesuai dengan situasinya. Hal ini menjadikan bahasa bukan semata-mata alat komunikasi atau sebuah system kode atau nilai yang secara sewenang-wenang menunjuk suatu realitas monolitik. Bahasa adalah suatu kegiatan sosial. Secara sosial ia terikat, dikonstruksi, dan direkonstruksi dalam kondisi khusus dan setting sosial tertentu, ketim-bang tertata menurut hukum yang diatur secara ilmiah dan universal (Latif dan Idi Subandy Ibrahim, 1996: 18).

Karenanya, sebagai representasi dari hubungan-hubungan sosial tertentu, bahasa senantiasa membentuk subjek-subjek, strategi-strategi, dan tema-tema wacana tertentu. Singkat-nya, bahasa merupakan ruang bagi pergelaran kuasa-kuasa tertentu. Dengan demikian, bahasa juga bisa dianggap sebagai cerminan dari situasi dan kinerja politik suatu bangsa. Hal ini mendapat penegasan dari Mochtar Pabottinggi dalam Latif dan Idi Subandy Ibrahim (1996: 18) yang menyatakan bahwa bahasa takkan pernah lepas dari politik, betapa phobia pun sebagian di antara kita akan kata “politik” itu. Memilih memakai bahasa atau kata-kata tertentu, menekankan pengertian tertentu atas kata, bahkan memakai dialek tertentu tak lain dari berpolitik dalam makna-nya yang paling dalam dan luas. Persis pada titik singgung inilah, peneliti merasa berkepentingan untuk mengkaji secara lebih mendalam, bagaimana perilaku berbahasa para pejabat yang di dalamnya merekam dan merefleksikan kondisi politik dan ideologi negara.

Pengkajian tentang hal di atas, telah dilakukan oleh Nurkamto (2001). Penelitian itu mendeskripsikan perilaku berkomunikasi di dalam budaya yang berbeda, yaitu budaya konteks rendah (*low-context cultures*) dan budaya konteks tinggi (*high-context cultures*). Dalam penelitian itu, komunikasi dibatasi pada komunikasi verbal, yang selanjutnya disebut berbahasa.

Berbeda dengan kajian di atas, penelitian ini mendeskripsikan tujuan

penggunaan bahasa, yang tidak dapat ditentukan hanya dari bentuk gramatikalnya, tetapi juga dari konteks digunakannya bahasa itu. Oleh karena itu, ketika para pejabat menggunakan bahasa (yaitu mengucapkan kata-kata atau kalimat), ia tidak semata-mata mengucapkan kata-kata atau kalimat itu melainkan sedang berbuat sesuatu dengan kata-kata atau kalimat tersebut. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada tuturan, yang meliputi (1) fungsi tuturan, (2) modus tuturan, (3) jenis tuturan, dan (4) strategi tuturan yang digunakan para pejabat negara dalam berita “korupsi” pada media massa cetak.

Dengan mengacu pada latar belakang penelitian, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimanakah fungsi tuturan pejabat negara dalam berita “korupsi” pada media massa cetak?
- Bagaimana modus tuturan pejabat negara dalam berita “korupsi” pada media massa cetak?
- Bagaimanakah jenis tuturan pejabat negara dalam berita “korupsi” pada media massa cetak?
- Bagaimanakah strategi tuturan pejabat negara dalam berita “korupsi” pada media massa cetak?

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh informasi apa adanya (sesuai dengan keadaan yang sebenarnya) mengenai status gejala pada saat penelitian dilakukan. Dengan demikian tidak ada perlakuan yang diberikan atau yang dikendalikan seperti yang terdapat dalam penelitian eksperimen. Arikunto (1998: 139) mengemukakan bahwa penelitian dengan metode deskriptif merupakan penelitian non-

hipotesis, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak diperlukan adanya rumusan hipotesis. Selanjutnya, mengenai penelitian yang bersifat kualitatif dimaksudkan bahwa kesahihan suatu data atau generalisasi tidak didasarkan pada jumlah persentase sampel atau fakta, melainkan didasarkan pada kualifikasi sumber data.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif non-hipotesis dan bersifat kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini hanya dideskripsikan keadaan dan status fenomena yang muncul dalam tindak tutur pejabat negara dalam berita “korupsi” pada media massa cetak.

### **Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini adalah berita utama surat kabar harian pagi Jawa Pos edisi September 2012 sampai dengan Desember 2012. Adapun data penelitian ini berupa tuturan para pejabat negara di tingkat pusat, yang meliputi pejabat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tuturan yang dimaksud adalah kalimat langsung dalam bentuk jawaban, pernyataan, komentar, atau tanggapan yang diberikan para pejabat tentang persoalan atau kasus korupsi yang ditanyakan wartawan atau pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan persoalan atau kasus tersebut.

### **Analisis Data**

Analisis data, menurut Patton (dalam Moleong, 2000: 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Adapun analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) selama pengumpulan data, dan (2) sesudah pengumpulan data. Tahap pertama dilakukan segera setelah pengumpulan data dilaksanakan. Setiap kali mengadakan pengumpulan data, analisis data awal segera dilakuk-kan agar analisis yang dihasilkan dapat

benar-benar mencerminkan hal-hal yang sebenarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sumber Tuturan

Sumber tuturan dalam penelitian ini diambil dari berita utama tentang korupsi dalam surat kabar harian pagi Jawa Pos edisi September 2012 sampai dengan Desember 2012 yang mengedepankan kasus perkara korupsi simulator SIM Korlantas Polri. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini tuturan yang diambil dari berita utama tentang korupsi tersebut bersumber dari para pejabat negara berikut.

- Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar
- Kapolri, Jenderal Timur Pradopo
- Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto
- Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombespol Agus Rianto
- Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi S. Hasibuan
- Juru Bicara KPK, Johan Budi S.P.
- Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja
- Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo
- Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas
- Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani
- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Sutarman
- Menkum HAM Amir Syamsuddin
- Wakapolri, Komjen Nanan Soekarna
- Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Adi Toegarisman
- JAM Pidsus, Andhi Nirwanto
- Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko, MA
- Ketua KPK, Abraham Samad
- Kadiv Humas Polri, Brigjen Suhardi Alius
- Wakil Ketua KPK, Zulkarnain
- Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi

- Presiden SBY
- Anggota Wantimpres, Albert Hasibuan

### Fungsi Tuturan Para Pejabat di Surat Kabar Harian Pagi Jawa Pos

Fungsi tuturan dalam penelitian akan dianalisis berdasarkan tiga empat tahapan alur perjalanan penyelesaian perkara korupsi simulator SIM Korlantas Polri yang melibatkan KPK dan Polri sebagai instansi penegak hukum. Keempat tahapan alur tersebut adalah tahap konflik awal, ketika masalah mulai muncul; tahap konflik, ketika konflik mulai menajam dan permasalahan mulai lebih serius; tahap klimaks, ketika permasalahan telah memuncak; dan tahap anti klimaks, ketika konflik mulai menurun.

Fungsi tuturan yang pengutaraannya digunakan untuk melakukan sesuatu disebut tuturan performatif (*performative*), sedangkan tuturan yang dipergunakan untuk mengatakan sesuatu disebut tuturan konstatif (*constative*). Tuturan performatif tidak mengandung nilai benar dan salah; tuturan ini ditandai dengan penggunaan subjek orang pertama dan kata kerjanya berkala kini (di dalam bahasa Inggris). Tuturan konstatif merupakan ekspresi kepercayaan yang dibarengi dengan ekspresi maksud sehingga mitra tutur membentuk (atau memegang) kepercayaan serupa.

Tahap konflik awal adalah tahapan yang mengandung peristiwa penyidikan perkara korupsi simulator SIM oleh KPK. Pada tahap ini, Polri menggunakan tuturan yang berfungsi performatif dan konstatif, sedangkan KPK menggunakan tuturan yang berfungsi konstatif. Tahap konflik adalah tahapan yang mengandung peristiwa penarikan penyidik KPK oleh Polri. Pada tahap ini, Polri menggunakan tuturan konstatif, sedangkan KPK menggunakan tuturan performatif. Tahap klimaks adalah tahapan yang mengandung peristiwa perintah penangkapan penyidik KPK oleh Polri. Pada tahap klimaks,

Polri dan KPK menggunakan tuturan yang berfungsi performatif daripada tuturan yang berfungsi konstatif. Tahap anti klimaks adalah tahapan yang mengandung peristiwa pemberian dukungan Presiden kepada KPK untuk melanjutkan penyidikan perkara korupsi simulator SIM. Dalam hal ini, Presiden menggunakan tuturan konstatif dan tuturan performatif, yang diikuti dengan tuturan konstatif dari Polri dan KPK.

### **Modus Tuturan Para Pejabat di Surat Kabar Harian Pagi Jawa Pos**

Secara formal, berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah (imperatif). Secara konvensional, kalimat berita digunakan untuk memberitakan sesuatu (informasi), kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan.

Pada tahap konflik awal Polri dan KPK menggunakan tuturan berita. Pada tahap konflik Polri dan KPK menggunakan tuturan berita. Pada tahap klimaks Polri menggunakan tuturan berita, sedangkan KPK menggunakan tuturan berita dan tanya. Pada tahap anti klimaks, Presiden, Polri dan KPK menggunakan modus berita. Modus berita digunakan Presiden dengan maksud menegaskan sikapnya terhadap penanganan perkara korupsi simulator SIM.

### **Jenis Tuturan Para Pejabat di Surat Kabar Harian Pagi Jawa Pos**

Sering terjadi bahwa seorang pembicara mengucapkan suatu ujaran dalam bentuk pertanyaannya, padahal maksudnya adalah permintaan. Dalam hal ini terjadi perbedaan antara apa yang dituliskan atau diucapkan dan apa yang dimaksudkan. Akan tetapi, tidak semua makna seperti itu bersifat sederhana. Dalam isyarat, sindiran, ironi, atau metafora, makna ujaran seseorang sangat bervariasi.

Tindak tutur langsung literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya: maksud memerintah disampaikan dengan kalimat perintah, memberitakan dengan kalimat berita, menanyakan sesuatu dengan kalimat tanya. Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur yang diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang digunakannya adalah sesuai dengan apa yang dimaksudkan penutur. Dalam tindak tutur ini, maksud memerintah diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya.

Tindak tutur langsung tidak literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturan, tetapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud penuturnya. Tindak tutur tidak langsung tidak lateral adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud kalimat yang hendak diutarakan.

Pada tahap konflik awal, Polri menggunakan tuturan langsung literal dan tuturan langsung tidak lateral, sedangkan KPK hanya menggunakan tuturan langsung literal. Pada tahap konflik, Polri menggunakan tuturan langsung literal dan tuturan langsung tidak lateral, sedangkan KPK hanya menggunakan tuturan langsung literal. Pada tahap klimaks, Polri dan KPK menggunakan lebih banyak variasi jenis tuturan. Polri menggunakan tuturan langsung literal dan tuturan tidak langsung tidak lateral. Di sisi lain, KPK menggunakan tuturan langsung literal, langsung tidak lateral, dan tidak langsung literal. Di samping tuturan Polri dan KPK, tahap anti klimaks ditandai dengan hadirnya tuturan Presiden. Ketiga pejabat negara ini menggunakan jenis tuturan langsung literal.

### **Strategi Tuturan yang Digunakan Para Pejabat di Surat Kabar Harian Pagi Jawa Pos**

Penutur wajib menjaga muka, baik muka sendiri maupun muka petutur, untuk menghindari kehilangan muka. Untuk itu, penutur harus dapat mengukur tingkat keterancaman muka berdasar-kan jarak sosial antara penutur dan petutur, besaran kekuasaan di antara penutur dan petutur, dan status relatif jenis tindak tutur yang dilakukan penutur dalam kebudayaan yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan derajat keterancaman itu, strategi yang dapat dipilih penutur adalah (1) bertutur secara terus terang, (2) bertutur dengan menggunakan kesantunan positif, (3) bertutur dengan menggunakan kesantunan negatif, dan (4) bertutur dengan cara samar-samar. Strategi kesopanan positif menekankan pada solidaritas, hubungan baik, dan persamaan antara penutur dan petutur. Adapun strategi kesopanan negatif tidak menekankan pada solidaritas atau persamaan antara penutur dan petutur, tetapi petutur berhak untuk bebas dari pembebanan.

Pada tahap konflik awal, Polri menggunakan strategi bertutur samar-samar. Di sisi lain KPK menggunakan strategi bertutur terus terang. Strategi bertutur dengan cara samar-samar digunakan Polri untuk memberikan pernyataan yang menyangkut pertanggungjawaban atas proses penyidikan perkara korupsi simulator SIM, yang diwujudkan dalam berbagai macam dalih, yaitu dalih kepastian hukum, dalih reputasi Polri, dalih tidak tahu menahu, dan dalih data yang membahayakan penyidikan. Di sisi lain KPK justru bertutur terus terang untuk memberikan pernyataan yang menyangkut proses pelimpahan perkara korupsi simulator SIM.

Pada tahap konflik ini, Polri menggunakan 3 strategi dalam bertutur, yaitu bertutur secara terus terang, bertutur dengan cara samar-samar, dan bertutur dengan menggunakan kesantunan negatif, sedangkan KPK memilih untuk bertutur secara terus

terang dan bertutur dengan menggunakan kesantunan positif.

Bertutur secara terus terang digunakan Polri untuk memberikan pernyataan yang tidak menyangkut pertanggungjawaban Polri atas proses penyidikan perkara korupsi simulator SIM, tetapi menyangkut anggota Polri yang menjadi penyidik KPK. Di samping itu, Polri juga bertutur samar-samar. Dalam hal ini, oleh Polri, bertutur samar-samar digunakan untuk memberikan pernyataan yang menyangkut pertanggungjawaban atas proses penyidikan perkara korupsi simulator SIM, yang diwujudkan dalam berbagai macam dalih, yaitu dalih data yang tidak benar dan dalih pertanggungjawaban hukum. Adapun bertutur dengan kesantunan negatif digunakan Polri untuk menyanggah atau menolak tuduhan pihak lain yang diwujudkan dalam bentuk prasangka negatif.

Berbeda dengan Polri, KPK bertutur secara terus terang untuk memberikan pernyataan yang menyangkut proses penyidikan perkara korupsi simulator SIM. Strategi tutur tersebut, didukung bertutur dengan kesantunan positif yang digunakan untuk memberikan harapan dan penghargaan positif terhadap berbagai pihak yang ikut membantu tugas KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka perkara korupsi simulator SIM.

Pada tahap klimaks, Polri menggunakan 3 strategi dalam bertutur, yaitu bertutur secara terus terang, bertutur dengan cara samar-samar, dan bertutur dengan menggunakan kesantunan negatif, sedangkan KPK memilih untuk bertutur secara terus terang dan bertutur dengan cara samar-samar. Bertutur secara terus terang digunakan Polri untuk memberikan pernyataan yang tidak menyangkut pertanggungjawaban Polri atas proses penyidikan perkara korupsi simulator SIM, tetapi menyangkut anggota Polri yang menjadi penyidik KPK. Di samping itu, Polri juga bertutur samar-samar. Dalam hal ini, oleh Polri, bertutur samar-samar digunakan Polri untuk memberikan pernyataan yang

menyangkut rencana pemeriksaan terhadap penyidik KPK, yang diwujudkan dengan dalih melakukan tindakan kriminal. Adapun bertutur dengan kesantunan negatif digunakan Polri untuk menyanggah atau menolak tuduhan pihak lain yang diwujudkan dalam bentuk prasangka negatif.

Bagi KPK, bertutur secara terus terang digunakan untuk menyampaikan protes kepada Polri yang berupaya menangkap penyidik KPK. Di sisi lain, KPK juga bertutur samar-samar, ketika memberikan pernyataan tentang penahanan tersangka perkara korupsi simulator SIM yang sedang diperiksa KPK. Dalam hal ini dalih yang digunakan KPK adalah waktu pemeriksaan tersangka.

Pada tahap anti klimaks yang menghadirkan tuturan Presiden di antara tuturan Polri dan KPK, semua pejabat negara menggunakan strategi bertutur secara terus terang. Bertutur secara terus terang digunakan presiden untuk menyampaikan sikapnya terhadap perkara korupsi simulator SIM. Di samping itu juga digunakan presiden

untuk memberikan evaluasi tentang kinerja Polri dan KPK. Adapun bertutur terus terang bagi Polri dan KPK merupakan pernyataan yang menegaskan rencana untuk melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut upaya penyidikan perkara korupsi simulator SIM. Meskipun demikian, masih terdapat seorang pejabat Polri yang masih bertutur dengan cara samar-samar. Bertutur samar-samar digunakan Polri untuk memberikan pernyataan yang menyangkut rencana mengusut penyidik KPK, yang diwujudkan dengan dalih tanggung jawab.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan peristiwa penyidikan perkara korupsi simulator SIM yang dialami oleh pejabat negara yang meliputi Polri, KPK, dan presiden menggunakan tuturan yang berbeda, baik fungsi tuturan, modus, jenis, maupun strategi tuturan.

Tabel 1. Tahapan tuturan

Tahap	Pejabat	Fungsi	Modus	Jenis	Strategi
Tahap Konflik Awal	Polri	performatif, konstatif	berita	langsung literal, langsung tidak lateral	samar-samar
	KPK	konstatif	berita	langsung literal	terus terang
Tahap Konflikasi	Polri	konstatif	berita	langsung literal, langsung tidak lateral	terus terang, samar-samar, kesantunan negatif
	KPK	performatif	berita	langsung literal	terus terang, kesantunan positif
Tahap Klimaks	Polri	performatif	berita	langsung literal, tidak langsung tidak lateral	terus terang, samar-samar, kesantunan negatif
	KPK	performatif	berita, tanya	langsung literal, langsung tidak lateral, tidak langsung literal	terus terang, samar-samar
Tahap Anti Klimaks	Polri	konstatif	berita	langsung literal	terus terang
	KPK	konstatif	berita	langsung literal	terus terang
	Presiden	konstatif, performatif	berita	langsung literal	terus terang

Perbedaan tersebut tentunya didasarkan atas maksud atau tujuan penutur, yang dalam hal ini pejabat negara, dalam menyampaikan tuturan. Menurut Brown dan Levinson, muka penutur rawan terhadap tuturan yang mengancam muka. Untuk itu, penutur wajib

menjaga muka, baik muka sendiri maupun muka petutur, untuk menghindari akibat kehilangan muka. Oleh karena itu, maksud atau tujuan pejabat negara dalam menyampaikan tuturan didasarkan atas dua pilihan, yaitu menyelamatkan muka institusi

atau menyelamatkan muka penegak hukum dalam menyidik perkara korupsi simulator SIM.

Tarigan, Henry Guntur. 1998. *Pengajaran Kedwibahasaan*. Bandung: Angkasa

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Wiwiek Dwi. 2001. "Tindak Tutur: Sorotan terhadap Cerita Bergambar untuk Kanak-kanak". Ditulis dalam *Linguistik Indonesia, Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia* Tahun 19, Nomor 2, Hal. 165-188.
- Chaer, Abdul dan Leon Agustina. 1995. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Syukur. 2001. *Pengantar Sosiolinguistik: Sajian Bunga Rampai*. Malang: Uni-versitas Negeri Malang.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (Ed.). 1996. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nurkamto, Joko. 2001. "Berbahasa dalam Budaya Konteks Rendah dan Budaya Konteks Tinggi". Ditulis dalam *Linguistik Indonesia, Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia* Tahun 19, Nomor 2, Hal. 205-217.
- Santoso, Anang. 1996. *Alih Kode dan Campur Kode Pada Dwibahasawan Jawa-Indonesia*. Tesis S-2 di IKIP Malang.
- Suparno. 2000. "Wacana Jual-Beli Berbahasa Indonesia". Ditulis dalam *Linguistik Indonesia, Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia* Tahun 18, Nomor 2, Hal. 1-19.